

Evaluasi Efektivitas Penataan Rambu Lalu Lintas di Kota Bandung: Tantangan dan Solusi

Rafli Yusuf Nugraha^{1*}, Budi Kurniadi²

^{1,2}Pascasarjana, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

e-mail: *rafli_yn@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 01, 2024

Revised September 10, 2024

Accepted September 20, 2023

Available online September 30, 2024

Kata Kunci:

Penataan Rambu Lalu Lintas,
Efektivitas, Tantangan, Solusi

Keywords:

Traffic Sign Management,
Effectiveness, Challenges, Solutions

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penataan rambu lalu lintas di Kota Bandung serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Metode yang digunakan meliputi wawancara dengan aparaturnya Dinas Perhubungan dan kepolisian, serta observasi lapangan untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penataan rambu lalu lintas telah dilakukan dengan baik, masih terdapat kendala seperti kurangnya koordinasi antar instansi, ketidaksesuaian pemasangan rambu, dan kurang optimalnya sistem informasi yang ada. Penempatan rambu yang tidak sesuai dan kurangnya visibilitas akibat faktor lingkungan menjadi penyebab utama ketidakefektifan dalam pengaturan lalu lintas. Penelitian ini juga menemukan bahwa penataan rambu yang baik dapat mengurangi pelanggaran dan kemacetan, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Perhubungan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan evaluasi dan pemeliharaan rambu secara berkala, serta melaksanakan kampanye sosialisasi

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem lalu lintas dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran lalu lintas juga perlu diperkuat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penataan rambu lalu lintas di Kota Bandung dapat lebih optimal, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan bagi semua pengguna jalan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan transportasi yang lebih efektif di daerah perkotaan.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the effectiveness of traffic sign management in Bandung City and the factors influencing its implementation. The methods used included interviews with officials from the Transportation Department and the police, as well as field observations to identify existing issues. The results showed that although traffic sign management had been carried out properly, there were still obstacles such as a lack of coordination between agencies, mismatched sign placements, and suboptimal information systems. Improper placement of signs and poor visibility due to environmental factors were the main causes of inefficiencies in traffic management. The study also found that proper traffic sign management could reduce violations and congestion while improving road safety. Therefore, it was recommended that the Transportation Department enhance coordination with relevant agencies, conduct regular evaluations and maintenance of traffic signs, and implement awareness campaigns to increase public understanding. Additionally, the utilization of information technology in traffic systems and consistent law enforcement against traffic violations needed to be strengthened. With these measures, traffic sign management in Bandung City was expected to become more optimal, reducing congestion and enhancing safety for all road users. This study made a significant contribution to the development of more effective urban transportation policies.

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan sektor transportasi bergantung tidak hanya pada kelancaran arus barang dan pergerakan sumber daya ekonomi, tetapi juga pada penempatan rambu lalu lintas yang efektif. Rambu lalu lintas yang tepat penting untuk mencapai tujuan secara efisien dan aman. Permasalahan transportasi perkotaan di Kota Bandung, seperti kemacetan lalu lintas, dipicu oleh terbatasnya perangkat isyarat lalu lintas dan kurangnya penunjuk arah yang memadai. Seiring

dengan pertumbuhan kota, kebutuhan transportasi semakin meningkat, menyebabkan kompleksitas masalah lalu lintas. Pemasangan rambu lalu lintas yang baik menjadi sangat krusial dalam mendukung keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993.

Di Kota Bandung, masalah terkait rambu lalu lintas terutama terlihat pada kurangnya Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), yang berfungsi memberikan informasi arah dan fasilitas di sepanjang jalan. Meskipun pembangunan infrastruktur terus berkembang, terutama di pinggiran kota, namun geometri persimpangan dan pengendalian lalu lintas belum sepenuhnya dipertimbangkan. Hal ini menyebabkan masalah seperti tunda antrean panjang dan arus lalu lintas yang tidak konsisten. Kondisi jalan yang membingungkan bagi pendatang baru dan wisatawan, terutama di persimpangan yang tidak dilengkapi dengan rambu yang memadai, menambah kesulitan dalam menjaga kelancaran lalu lintas.

Oleh karena itu, penggunaan RPPJ di Kota Bandung harus didasarkan pada kebutuhan nyata, mengingat beberapa di antaranya masih belum mampu memberikan informasi yang jelas dan efektif. Untuk mencapai tujuan pemasangan rambu, diperlukan langkah-langkah evaluasi dan perbaikan untuk memastikan rambu dapat dipasang dan berfungsi secara efektif serta efisien. Selain penempatannya yang kurang tepat, penambahan rambu-rambu jalan juga diperlukan untuk menyesuaikan dengan kepadatan penduduk pengguna jalan dan percepatan pembangunan Kota Bandung. Berdasarkan pengamatan sementara, penataan rambu lalu lintas di Kota Bandung pada tahun 2022 akan ditandai secara khusus dengan adanya pemberitahuan mengenai beberapa permasalahan.

Pertama, semakin banyak pengguna jalan yang memarkir kendaraannya pada lokasi yang tidak tepat, sehingga menghalangi arus kendaraan yang lewat. Hal ini diperparah oleh kurangnya rambu lalu lintas berupa petunjuk arah atau peringatan di lokasi tertentu. Kedua, terdapat daerah rawan kecelakaan yang disebabkan oleh pengguna jalan yang mengemudi melebihi kecepatan rata-rata. Kondisi ini membutuhkan perhatian lebih dalam penempatan rambu-rambu peringatan untuk meningkatkan keselamatan. Ketiga, masih ada keluhan dan pengaduan terhadap kondisi serta penempatan rambu-rambu jalan yang dianggap tidak jelas dan membingungkan. Hal ini menjadi kendala bagi pengguna jalan, warga kota, serta wisatawan domestik maupun internasional yang beraktivitas di Kota Bandung.

Pernyataan tersebut didukung oleh beberapa temuan penelitian yang diperoleh peneliti melalui studi literatur, yang merekomendasikan berbagai hal terkait manajemen lalu lintas. Dengan kata lain, diperlukan pemasangan lampu lalu lintas yang sesuai dengan hasil perhitungan survei di empat arah jalan. Rambu-rambu lalu lintas juga harus dirancang untuk memenuhi peraturan yang berlaku serta dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna jalan.

Usulan pembangunan yang diajukan meliputi pengaspalan tepi jalan untuk menghindari kecelakaan dan mempermudah manuver truk, pembuatan jalur khusus belok kiri untuk mengurangi antrean panjang dan kemacetan, serta pemasangan media jalan dan jalur belok kanan agar jalur khusus tersebut terhubung dengan jalan raya. Sebagai tambahan, disarankan untuk mendirikan rambu petunjuk arah yang jelas menuju lokasi tujuan pengguna jalan.

Kondisi kebutuhan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dibandingkan dengan realitas yang terpasang pada berbagai lokasi di Kota Bandung secara kuantitatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kebutuhan dan Realisasi Pemasangan Rambu Lalu Lintas Kota Bandung Tahun 2021-2023

Tahun	2021		2022		2023	
Nama Rambu	Jumlah Kebutuhan	Terpasang	Jumlah kebutuhan	Terpasang	Jumlah Kebutuhan	Terpasang
RPPJ	96	70	96	80	96	85
Peringatan	22	4	22	7	22	10
Larangan	2424	1580	2424	1745	2424	1880
Petunjuk	1611	1321	1611	1422	1611	1544
Penegasan	117200	100500	117200	102405	117200	105500

Dari tabel di atas, terlihat bahwa penataan rambu lalu lintas di Kota Bandung selama periode 2021 hingga 2023 (3 tahun) belum optimal. Hal ini tercermin dari jumlah rambu yang dibutuhkan setiap tahunnya dan status pelaksanaannya yang belum memadai. Beberapa temuan lain di lokasi penelitian mengungkapkan adanya kemacetan parah akibat tidak berfungsinya rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas, keterbatasan sistem informasi antara Dinas Lalu Lintas dan pemangku kepentingan mengenai penempatan rambu, serta kurang optimalnya penindakan terhadap pelanggaran rambu lalu lintas. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa permasalahan ketidakefektifan penataan dan pendataan rambu lalu lintas di Kota Bandung bukan hanya disebabkan oleh satu faktor. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel moderasi sebagai salah satu faktor yang diduga memengaruhi efektivitas program tersebut dari waktu ke waktu.

Koordinasi menjadi elemen yang sangat penting untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Dinas Lalu Lintas secara teknis memiliki peran utama dalam penyelenggaraan urusan lalu lintas, termasuk penempatan lampu lalu lintas dan pendataan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021, Dinas Perhubungan memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan pemerintah di bidang transportasi. Studi ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai lembaga, seperti kepolisian, Dinas Pertamanan, dan Dinas Bina Marga. Kepolisian bertanggung jawab atas tugas-tugas kepolisian umum, termasuk mengatur transportasi darat, memberikan izin pemasangan rambu, serta memelihara rambu agar tetap berfungsi dengan baik.

Dinas Pertamanan juga berperan dalam memastikan pemasangan rambu lalu lintas dilakukan secara strategis dan tidak mengganggu pepohonan di sekitar jalan. Sementara itu, Dinas Bina Marga bertugas menyediakan pelayanan infrastruktur jalan, seperti perbaikan jalan, trotoar, dan pipa drainase. Rambu lalu lintas yang dipasang di jalan setapak atau jalan raya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak hasil pekerjaan infrastruktur tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam permasalahan ini dan menuangkannya ke dalam tesis berjudul "Evaluasi Efektivitas Penataan Rambu Lalu Lintas di Kota Bandung: Tantangan dan Solusi."

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori sebagai alat analisis dalam penelitian ini didasarkan pada fungsi manajemen, salah satu aspek teori manajemen yang dikemukakan oleh banyak ahli. Koordinasi merupakan salah

satu fungsi manajemen yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin, baik dalam organisasi, instansi pemerintah, maupun swasta, terutama dalam mencapai tujuan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Keselarasan dan kerja sama yang harmonis diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan bersama. Direktur Pelayanan Perhubungan, dalam pelaksanaan tugasnya, menjalankan wewenang Direktur Jenderal Perhubungan, Gubernur, dan Wali Kota. Beberapa lembaga yang terkait, seperti kepolisian, Departemen Jalan Raya, dan Departemen Pertamanan, memiliki tanggung jawab dalam bidang lalu lintas, terutama dalam pengorganisasian dan pendataan rambu lalu lintas.

Hasibuan (2008:85) mendefinisikan koordinasi sebagai kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen serta pekerjaan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Handyaningrat (1994:177) menambahkan bahwa koordinasi adalah usaha menyatukan kegiatan dari berbagai unit kerja agar organisasi bergerak sebagai satu kesatuan yang utuh guna mencapai tujuannya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa koordinasi yang efektif dicapai melalui hubungan kerja yang aktif. Hubungan kerja ini, sebagai bentuk komunikasi administratif, menjadi landasan penting dalam tercapainya koordinasi yang efektif dan efisien.

Koordinasi dalam pengambilan keputusan melibatkan hubungan interpersonal, kolaborasi, dan integrasi berbagai upaya untuk mencapai tujuan bersama. Untuk menjaga kerja sama yang baik, diperlukan kesatuan tindakan dan landasan koordinasi yang jelas. Sugandha (1986:12) menyatakan bahwa fungsi koordinasi memungkinkan terwujudnya kesatuan antara unit-unit organisasi serta keharmonisan dalam administrasi, yang harus berjalan sebagai suatu sistem yang terpadu. Agar koordinasi berjalan sesuai dengan tujuan, Hasibuan (2008:88) mengemukakan beberapa syarat koordinasi, yaitu: (1) *sense of cooperation* (perasaan untuk bekerja sama), yang dilihat dari sudut bidang pekerjaan, bukan individu; (2) *rivalry* (persaingan), yang mendorong kompetisi sehat antarbagian untuk mencapai kemajuan; (3) *team spirit* (semangat tim), yang menekankan saling menghargai antarbagian; dan (4) *esprit de corps* (saling menghormati), yang meningkatkan semangat kerja melalui penghargaan terhadap kontribusi setiap bagian. Syarat-syarat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengoptimalkan penataan rambu lalu lintas melalui kerja sama yang baik antarinstansi terkait, khususnya di Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Efektivitas dalam organisasi memiliki beragam makna tergantung pada kerangka acuan yang digunakan. Steers (1985:1) melihat efektivitas dari sudut kualitas kehidupan pekerja. Efektivitas dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan adalah keberhasilan mencapai sasaran sesuai kebijakan, rencana, dan program yang telah ditentukan. Efektivitas sebagai kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi yang tepat. Steers (1985:4-7) mengemukakan tiga konsep utama dalam menilai efektivitas, yaitu: (1) optimasi tujuan, yang mengukur sejauh mana organisasi mencapai tujuan layak; (2) perspektif sistematis, yang menilai keterpaduan tujuan dalam struktur organisasi; dan (3) perilaku manusia dalam organisasi, yang melihat bagaimana tingkah laku individu dan kelompok dapat mendukung atau menghambat tercapainya tujuan.

Berdasarkan konsep efektivitas yang dikemukakan Steers, penelitian ini mengaplikasikan dimensi optimasi tujuan, perspektif sistematis, dan perilaku manusia dalam organisasi sebagai landasan teori untuk menganalisis masalah yang diteliti. Dari pengertian-pengertian tersebut, batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Koordinasi adalah proses menggerakkan dan membina unit kerja dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh individu yang memiliki kewenangan; (2) Koordinasi dapat tercapai apabila

memenuhi syarat-syarat, seperti kesadaran untuk bekerja sama (*sense of cooperation*), kompetisi sehat (*rivalry*), semangat tim (*team spirit*), dan penghormatan timbal balik (*esprit de corps*); (3) Dinas Perhubungan adalah instansi pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, termasuk penataan rambu lalu lintas; (4) Efektivitas adalah keadaan di mana sasaran atau tujuan tercapai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatori, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan desain eksplanatori dengan pendekatan *cross-sectional*, yang berarti data dikumpulkan dan diamati hanya satu kali (Sugiyono, 2018:83). Seluruh data yang diperoleh akan diolah menggunakan analisis kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Dinas Perhubungan Kota Bandung atau sumber data utama penelitian, sedangkan data sekunder berasal dari buku, dokumen, jurnal, dan artikel ilmiah lain yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu observasi, kuesioner, dan wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati objek penelitian dan mencatat berbagai gejala penting yang berkaitan dengan objek penelitian. Kuesioner disusun dalam format pilihan ganda untuk memudahkan responden dalam menjawab, dan disebarluaskan kepada responden yang terlibat dalam penempatan rambu lalu lintas dan pendataan di Kota Bandung. Wawancara dilakukan dengan berkomunikasi langsung dengan petugas pelayanan dan instansi terkait untuk mengumpulkan data mengenai rambu lalu lintas Transportasi Darat Kota Bandung.

Populasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2018:57). Silalahi (2016:233) menjelaskan bahwa populasi adalah jumlah total dari seluruh unit atau elemen yang menjadi perhatian peneliti, seperti organisme, kelompok masyarakat, organisasi, atau objek lainnya yang memiliki karakteristik tertentu yang diidentifikasi secara spesifik. Sampel diambil menggunakan teknik *Simple Random Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak tanpa mempertimbangkan strata dalam populasi (Sugiyono, 2018:82), dan ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Yamane.

Data yang dikumpulkan berupa data ordinal, dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh koordinasi terhadap efektivitas penataan dan pendataan rambu lalu lintas angkutan darat di Kota Bandung. Menurut Singarimbun & Effendi (1989:263), analisis data adalah proses menyederhanakan data ke dalam format yang mudah dibaca dan diinterpretasikan, sering kali dengan bantuan statistik. Statistik digunakan untuk mengubah data penelitian menjadi informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, validitas instrumen diuji untuk memastikan ketepatan alat ukur dalam mengukur sifat yang diteliti. Instrumen yang valid harus memiliki validitas internal, yaitu standar rasional yang mencerminkan apa yang diukur, serta validitas eksternal, yang dapat diuji dengan membandingkan isi instrumen dengan desain program tertentu, misalnya melalui uji korelasi antara skor instrumen dengan skor acuan.

Setelah uji validitas, dilakukan uji reliabilitas untuk memastikan konsistensi hasil pengukuran. Menurut Ancok dalam Singarimbun & Effendi (1995:122), alat ukur dianggap reliabel jika menghasilkan hasil yang konsisten ketika digunakan berulang kali pada objek yang sama. Reliabilitas

menunjukkan konsistensi pengukuran, yang menjadi penting dalam penelitian sosial untuk meminimalkan kesalahan pengukuran akibat gejala sosial yang kurang andal dibandingkan gejala fisik. Analisis data dilakukan menggunakan koefisien korelasi *rank* Spearman, yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat serta untuk menguji hipotesis. Koefisien ini cocok digunakan karena variabel penelitian memiliki skala pengukuran ordinal. Koefisien korelasi *rank* Spearman mengukur hubungan antara dua variabel yang diberi peringkat pada skala ordinal, sehingga memungkinkan objek atau responden untuk dirangking pada dua peringkat secara bersamaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, penelitian membuat variabel fektivitas Penataan Rambu Lalu Lintas di Kota Bandung sebagai variabel Y terdiri dari 3(tiga) Sub dimensi, 7 (tujuh) indikator dan 7 (tujuh) pertanyaan, sebagai berikut:

A. Optimasi tujuan Dengan Indikator:

1. Mengurangi pelanggaran

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan beberapa aparatur Dinas Perhubungan bahwa penataan rambu lalu lintas yang baik dapat mengurangi pelanggaran yang sering terjadi di Kota Bandung. Dari hasil observasi hampir sebagian besar titik yang banyak terjadi pelanggaran setelah di pasang rambu angka pelanggarannya menjadi berkurang. Dengan demikian peneliti menarik kesimpulan bahwa penataan rambu lalu lintas yang di atur sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk palaksana untuk memenuhi perlengkapan jalan dapat mengurangi pelanggaran di Kota Bandung

2. Mencegah kemacetan

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dengan beberapa aparatur Dinas Perhubungan dan lembaga kepolisian dalam melakukan penataan rambu lalu lintas yang baik bertujuan untuk mengurangi dampak keracetan yang selalu terjadi di Kota Bandung. Semua tugas dan kewenangan Dinas Perhubungan dan Lembaga kepolisian dalam melakukan penataan rambu lalu lintas, terlihat cukup dilaksanakan untuk mengurangi kemacetan sesuai dengan target yang telah ditentukan, tetapi dalam pelaksanaan penataan rambu lalu lintas masih terdapat beberapa Penataan rambu yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan sehingga harus dilakukan secara detail karena sering di jumpai di beberapa tempat di Kota Bandung masih sering mengalami kemacetan. Semua ini harus di kaji ulang dalam melakukan penatan rambu yang sesuai dengan kepadatan kendaraan.

Dengan demikian peneliti menarik kesimpulan bahwa dinas Perhubungan dan Lembaga Kepolisian sudah cukup baik dalam melaksanakan penataan rambu lalu lintas sesuai dengan prosedural yang telah ditentukan sehingga dapat mengurangi kemacetan, tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa tempat di Kota Bandung yang mengalami kemacetan sehingga harus di tinjau ulang oleh dinas Perhubungan dalam melakukan penataan rambu lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan beberapa aparatur Dinas Perhubungan dan Pihak kepolisian bahwa yang dilakukan oleh dinas perhubungan dan Pihak kepolisian sangat baik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga penataan rambu lalu lintas dapat mengurangi kecelakaan yang selalu terjadi. Dengan demikian peneliti menarik kesimpulan bahwa dinas perhubungan dalam hal ini sudah melakukan penataan rambu yang tepat sesuai dengan prosedur yang telah

ditentukan untuk mengurangi kecelakaan, walaupun masih terdapat beberapa kendala-kendala yang mengakibatkan Kkcelakaan lalu lintas,

B. Perspektif sistematis Dengan Indikator:

1. Sistem informasi di dinas perhubungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa aparatur Dinas Perhubungan bahwa sistem informasi dinas perhubungan sudah tersusun dengan jelas dan efisien, sehingga dapat di lihat dan patuhi oleh para pengguna jalan. Dengan demikian peneliti menarik kesimpulan bahwa sistem informasi yang dibuat oleh dinas perhubungan sudah tersusun dengan jelas, memuat dan mendukung, akan tetapi-hasil dilapangan masih terdapat sistem informasi dinas perhubungan yang kurang sesuai dengan apa yang tertera dalam pelaksanaannya. Masih banyak sistem informasi seperti rambu-rambu dalam pemberian petunjuk kurang jelas, sehingga dalam proses penataan sistem informasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dilaksanakan agar lebih baik lagi.

2. Sistem pemasangan rambu-rambu

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa aparatur sistem pemasangan rambu-rambu telah tertata dengan jelas dan tepat dari segi fisik dan bentuk sistem rambu tersebut, tetapi masih terdapat ketidaksesuaian dengan keadaan dilapangan atau terdapat beberapa kasus cara pemasangan rambu yang sering tidak terlihat oleh para pengguna jalan karena berdampingan dengan pohon, pengrusakan rambu, dan pencurian, sehingga pemasangan rambu harus di cek ulang oleh pihak Dinas Perhubungan. Sistem pemasangan rambu-rambu yang di buat oleh dinas perhubungan masih terdapat beberapa kelemahan dalam meningkatkan pemasangan dan penempatannya agar dapat di tinjau dan awasi. Dengan demikian peneliti menarik kesimpulan bahwa sistem pemasangan rambu-rambu tertata sudah jelas dan tepat, namun dalam pelaksanaannya tidak sedikit dari para pihak pengguna jalan yang menemukan kesulitan-kesulitan dalam melakukan perjalanan di Kota Bandung untuk itu dalam memberikan sistem pemasangan rambu-rambu Dinas Perhubungan harus di ikuti dengan penataan secara optimal dan melakukan pengawasan disetiap pemasangan rambu.

C. Perilaku pegawai dalam organisasi Dengan Indikator:

1. Menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran rambu lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur dari pihak kepolisian sering dilakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran rambu lalu lintas oleh para pengguna jalan seperti parkir sembarangan, berhenti sembarangan, putar balik kendaraan, sehingga diperlukan peninjauan di setiap jalan-jalan di Kota Bandung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan tersebut agar dapat memematuhi rambu lalu lintas. Dinas Perhubungan dan Kepolisian menginginkan agar para pengguna jalan dapat menggunakan jalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di jalan dengan mengikuti petunjuk jalan yaitu rambu lalu lintas demi kelancaran dan keselamatan kita bersama. Dengan demikian peneliti menarik kesimpulan bahwa aparatur Dinas Perhubungan dan Kepolisian selalu menindak para pengguna jalan yang melanggar rambu lalu lintas di Kota Bandung, itu semua untuk kelancaran dan keselamatan para pengguna jalan.

2. Meningkatkan konsistensi terhadap tugasnya masing-masing

Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa aparatur dinas perhubungan kepolisian, bina marga, dan pertamanan selalu meningkatkan konsistensi terhadap tugasnya masing-masing yang sangat baik, namun sering kali terdapat aparat yang hanya mementingkan masing-masing kelompoknya. Akan tetapi semuanya dapat berjalan dengan baik karena satu tujuan yaitu melaksanakan pelaksanaan penataan rambu lalu lintas di Kota Bandung dalam meningkatkan

konsistennya bersama-sama melakukan tugasnya masing-masing sehingga semuanya dapat berjalan dengan optimal.

Dengan demikian peneliti menarik kesimpulan bahwa aparaturnya dinas perhubungan, kepolisian, bina marga, dan pertamanan selalu meningkatkan konsistensi terhadap tugasnya masing-masing sehingga tujuan Penataan rambu lalu lintas di Kota Bandung dapat terlaksana dengan baik.

Pengujian Hipotesis

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode korelasional yaitu metode yang bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain mengetahui keeratan hubungan antar variabel dimana keeratan hubungan tersebut biasanya diperlihatkan oleh koefisien korelasi.

Untuk melihat bagaimana hubungan variabel bebas dan variabel terikat, serta untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti pada bab pendahuluan, teknik analisis yang digunakan adalah Koefisien korelasi Rank Spearman, mengingat variabel-variabel menggunakan skala pengukuran ordinal, Berdasarkan hasil dari responden, terdapat rank kembar dari kedua variabel yaitu variabel bebas atau variabel X (pengaruh koordinasi oleh dinas Perhubungan) dan variabel terikat atau variabel Y (efektivitas penataan rambu lalu lintas di kota Bandung. Didapat data statistik sebagai berikut:

Sehingga untuk mencari Rank Spearman menggunakan rumus sebagai berikut

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d_i^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

engan perhitungan untuk mencari harga $\sum x^2$ adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum x^2 &= \frac{N^3 - N}{12} - \sum Tx \\ &= \frac{148^3 - 148}{12} - 961 \\ &= \frac{3241792 - 148}{12} - 961 = \frac{3241644}{12} - 961 = 270137 - 268,9 \\ &= 26176 \end{aligned}$$

Dengan perhitungan untuk mencari harga $\sum y^2$ adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum y^2 &= \frac{N^3 - N}{12} - \sum Ty \\ &= \frac{148^2 - 148}{12} - 1488,16 \\ &= \frac{3241792 - 148}{12} - 1488,16 \\ &= \frac{3241644}{12} - 1488,16 \\ &= 270137 - 1488,16 \end{aligned}$$

$$= 268648,84$$

Dengan hasil perhitungan diatas maka:

$$\begin{aligned}\sum Ty &= 961S \\ \sum Ty &= 1488,16 \\ \sum y^2 &= 268648,84 \\ \sum x^2 &= 269176\end{aligned}$$

Untuk mencari rs menggunakan rumus sebagai berikut

$$\begin{aligned}rs &= \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum di^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}} \\ rs &= \frac{331978,34}{2\sqrt{(269176)(268648,84)}} \\ &= \frac{331978,34}{537824,5816} = 0,62\end{aligned}$$

Dengan hasil perhitungan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi Rank Spearman (rs) untuk variable pengaruh koordinasi terhadap efektifitas penataan rambu lalu lintas adalah sebesar 0,62 atau menurut pedoman dari Sugiyono (2007:184) korelasi antara variabel X dan Y menunjukkan hubungan yang kuat.

Koefisien Determinasi

Untuk mencari besarnya pengaruh antara variabel X (pengaruh koordinasi oleh Dinas perhubungan) dan variabel Y (efektivitas penataan rambu lalu lintas di Kota Bandung), ditentukan dengan mencari Koefisien Determinasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}KD &= rs^2 \times 100\% \\ KD &= 0,62^2 \times 100\% \\ KD &= 0,3844 \times 100\% = 38,44\%\end{aligned}$$

Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pengaruh koordinasi terhadap efektivitas penataan rambu lalu lintas angkutan darat di Kota Bandung sebesar 38,44 % dan sisanya 61,56% dipengaruhi oleh faktor lain yang dalam konteks penelitian ini tidak diteliti oleh peneliti.

Berdasarkan hasil pengolahan data, rumusan masalah, dan hipotesis yang terbukti benar, berikut dapat dilakukan pembahasan mengenai variabel independen berdasarkan analisis skor variabel-variabel tersebut. Efek penyesuaian juga tergolong dalam kategori “baik” dibandingkan dengan nilai ideal yang ditentukan. Situasi ini menunjukkan bahwa dampak penyesuaian bersifat positif. Saat menempatkan rambu lalu lintas, Anda dapat menggambar berbagai dimensi dan menggunakannya sebagai pengukuran.

Pemerintah daerah dan Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan peraturan daerah tentang penempatan rambu lalu lintas. Empat dimensi memberikan kondisi penting untuk keberhasilan koordinasi. Kolaborasi ini dinilai baik oleh Departemen Perhubungan, polisi, jalan raya, taman dan pejabat masyarakat. Koordinasi melalui rasa kolaborasi (sense of cooperation) harus

dilihat dari sudut pandang wilayah kerja individu bukan dari sudut pandang satu orang (Hasibuan, 2008: 88).

Persyaratan koordinasi ini berdampak pada setiap departemen, termasuk koordinasi di departemen transportasi, yang mengoordinasikan pembuatan dan pemasangan signage yang sesuai. Polisi akan mengoordinasikan pemasangan rambu-rambu yang sesuai dan sesuai serta penindakan terhadap pelanggaran rambu.

Dinas Pertamanan akan menyesuaikan penempatan rambu-rambu tersebut agar tidak mengurangi keindahan kota. Pengelola jalan akan melakukan penyesuaian untuk memastikan pemasangan rambu tidak mempengaruhi hasil pembangunan jalan. Kerjasama dalam koordinasi merupakan hal yang wajib bagi setiap anggota atau otoritas terkait.

Kesimpulan yang bisa diambil adalah penempatan lampu lalu lintas harus berdasarkan kesepakatan antara Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, dinas jalan tol, dan dinas parkir yang banyak di antaranya masih dalam tahap implementasi.

Penyesuaian karena persaingan (*rivalry*). Pada perusahaan-perusahaan besar seringkali terjadi persaingan antar bagian sehingga mengakibatkan bagian-bagian tersebut bersaing untuk mendapatkan kemajuan (Hasibuan, 2008: 88). Di bidang pemeliharaan rambu lalu lintas, berbagai instansi berlomba-lomba untuk mencapai hasil agar pemeliharaan rambu lalu lintas berjalan lancar. Ini bukan kompetisi untuk menjadi instansi terbaik, namun tujuannya adalah untuk mencapai hasil kerja yang optimal dalam pemasangan rambu lalu lintas. Hal ini terlihat dari konsistensi aparat kepolisian dalam memasang rambu lalu lintas, meski aparat kepolisian masih banyak membuahkan hasil yang optimal. Meski harus dilaksanakan berdasarkan amanah masing-masing otoritas terkait, namun masih ada pihak yang tidak konsisten dalam menjalankan amanahnya.

Koordinasi dengan semangat tim artinya setiap sektor harus saling menghormati (Hasibuan, 2008: 88). Kekuatan suatu organisasi terletak pada semangat dan semangatnya, sehingga pemimpin harus mampu membangkitkan semangat anggotanya dalam menyelesaikan tugasnya. Agar pemasangan rambu lalu lintas dapat berjalan dengan baik, kepala dinas lalu lintas harus melibatkan instansi lain dan bekerja sama dalam pelaksanaan pemasangan rambu lalu lintas. Direksi Dinas Perhubungan hendaknya melibatkan pihak lain dalam penempatan lampu lalu lintas untuk memastikan penempatan lampu lalu lintas optimal dan sesuai harapan.

Meskipun Dinas Perhubungan sepenuhnya mengoordinasikan pemeliharaan lampu lalu lintas dengan melibatkan instansi terkait, namun beberapa pejabat belum dapat menjalankan perannya secara maksimal. Koordinasi melalui sikap saling menghormati (*esprit de corps*), yaitu melibatkan dan mengevaluasi bagian-bagian, umumnya meningkatkan aktivitas antusias (Hasibuan, 2008: 88).

Membangun hubungan baik antar otoritas akan memudahkan penerapan peraturan rambu lalu lintas. Adanya keselarasan dan keselarasan dalam kerjasama antar otoritas juga dapat mendukung tercapainya tujuan penataan rambu lalu lintas. Selain itu, agar pengaturan lampu lalu lintas dapat berfungsi dengan baik, keseragaman dan keseragaman yang terjalin antar otoritas lain yang memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas sangat diperlukan.

Selain kebutuhan koordinasi yang dijelaskan dalam ATNS, direktur pelayanan transportasi harus mampu berkomunikasi dan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat. Hal ini untuk

memastikan masyarakat dan pengguna jalan dapat mencermati rambu-rambu yang dipasang oleh otoritas lalu lintas dan otoritas lainnya.

Kesimpulannya adalah adanya keselarasan dan keselarasan antara pelayanan transportasi dengan institusi Yingning dapat mempengaruhi secara positif tujuan penempatan rambu lalu lintas sesuai prosedur institusi yang telah ditetapkan. Menurut peneliti, ada tiga jenis koordinasi dalam Hasibuan, yaitu koordinasi melalui kerja sama (*cooperation*), koordinasi melalui kompetisi (*rivalry*), koordinasi melalui semangat tim (*team spirit*), dan koordinasi melalui sikap saling menghormati (*esprit de corps*). Jika pembaca bekerja dengan baik, program, dalam hal ini pemasangan lampu lalu lintas, berjalan dengan sukses.

Pemimpin bisa dijadikan sebagai bahan acuan tercapainya suatu program yang sedang dilaksanakan. Koordinasi yang dilakukan seorang pemimpin harus berpegang pada pedoman koordinasi yang tepat yaitu harus terpusat, terpadu, berkesinambungan dan menggunakan pendekatan multi instansional, yakni dengan wujud saling memberikan informasi yang relevan untuk menghindari saling tumpang tindih tugas yang satu dengan tugas yang lain. Bahwa dengan adanya keserasian dan keharmonisan antara Dinas Perhubungan dengan instansi lainnya dapat memberikan dampak yang baik sehingga tujuan untuk penataan rambu lalu lintas dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dengan demikian peneliti menarik simpulan bahwa aparaturnya dinas perhubungan menjaga keserasian dan keharmonisan dengan baik dalam bekerja sama sehingga tujuan penataan rambu dapat tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penataan rambu lalu lintas dan sistem informasi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan serta kerjasama dengan pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya di Kota Bandung sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Koordinasi yang efektif antara berbagai instansi sangat penting untuk memastikan bahwa rambu lalu lintas dapat dipatuhi oleh pengguna jalan, serta untuk mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Meskipun sistem informasi yang ada sudah tersusun dengan jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti ketidaksesuaian pemasangan rambu dan kurangnya visibilitas rambu akibat faktor lingkungan.

Untuk meningkatkan efektivitas penataan rambu lalu lintas, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, Dinas Perhubungan dan instansi terkait perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam penataan rambu lalu lintas. Pendekatan multi-instansional yang terintegrasi dapat membantu menghindari tumpang tindih tugas dan meningkatkan efisiensi. Kedua, evaluasi dan pemeliharaan rambu lalu lintas harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua rambu terlihat jelas dan berfungsi dengan baik, serta mengatasi masalah seperti pengrusakan dan pencurian rambu. Ketiga, penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi rambu lalu lintas melalui kampanye keselamatan lalu lintas yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Keempat, Dinas Perhubungan dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan sistem informasi lalu lintas, seperti aplikasi mobile yang memberikan informasi real-time tentang kondisi lalu lintas dan lokasi rambu, sehingga membantu pengguna jalan dalam merencanakan perjalanan mereka dengan lebih baik. Terakhir, kerjasama yang lebih erat antara Dinas Perhubungan dan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas harus

ditingkatkan, karena penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera bagi pelanggar dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap rambu lalu lintas. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan penataan rambu lalu lintas dan sistem transportasi di Kota Bandung dapat berjalan lebih optimal, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan bagi semua pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, I., Nugraha, R. S., & Sihombing, A. L. The Development of Punishment in Indonesian Criminal Law. *JURNAL AKTA*, 11(4), 1198-1212.
- Handayani, Soewarno. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Hasibuan, Malayu S.P. (2008). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Bandung: Bumi Aksara.
- Kanya, N. (2021). The effect of good corporate governance on production effectiveness. *Almana: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5(1), 93-100.
- Kanya, N. (2021). Budget participation and organizational commitment on managerial performance: the moderating role of locus of control. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 365-377.
- Kurniati, Y. (2023). OBLIGATION TO PROVIDE FOOD SAFETY GUARANTEE BY BUSINESS PLAYERS TO CONSUMERS. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(01), 43-49.
- Kurniati, Y. (2023). DISKURSUS KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA ERA PENERAPAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 1-6.
- Nurdiyansah, A., Rohayati, Y., & Syam, R. Z. A. (2024). LEADERSHIP AND CONTEMPORARY PUBLIC POLICY. *Jurnal Sosio dan Humaniora (SOMA)*, 2(2), 190-198.
- Purnomo, H. (2023). Providing Legal Assistance For Defendants In Examination Of Criminal Cases In State Courts. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 1(02), 40-47.
- Purnomo, H. (2023). DOMESTIC VIOLENCE ACCORDING TO LAW NUMBER 23 OF 2004: A JURIDICAL STUDY. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(01), 92-97.
- Rohayati, Y., Nurdiyansah, A., & Syam, R. Z. A. (2024). PENGEMBANGAN KOMPETENSI PELAYANAN DESA BERBASIS DIGITAL DI DESA WANGUNJAYA KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 152-158.
- Sihombing, L. A. (2022). Law Enforcement of Corporate Crime in Forest Fire in Indonesia. *INFOKUM*, 10(5), 1472-1476.
- Silalahi, Ulber. (2016). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press.
- Singarimbun, Masri, dan Efendi. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3LS.
- Singarimbun, Masri, Sofian Effendi. (1995). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Steers M, Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugandha. (1986). *Manajemen Administrasi, Suatu Pendekatan Sistem Dalam Manajemen Perkantoran*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syam, R. Z. A., Kanya, N., & Achmad, W. (2023). HUMAN RELATIONS ACTIVITIES OF RW MANAGERMENTS IN BUILDING THE LIFE OF HARMONY OF CITIZENS. *Jurnal Scientia*, 12(03), 3139-3146.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan